



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YADI SUKMAYADI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 908534

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.790.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 395 m2/174 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN	Rp. 1.790.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	646.300.000
1. MOTOR, HONDA NC11A3CB A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp. 7.800.000	
2. MOTOR, HONDA K1H02N14L0 A /T Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp. 10.000.000	
3. MOTOR, HONDA L1K02Q33L1 A / T Tahun 2022, HASIL SENDIRI	Rp. 29.500.000	
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T (GUN166R-SDTHXD) Tahun 2022, HASIL SENDIRI	Rp. 599.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	342.931.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	413.463.902
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.192.694.902
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.192.694.902

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.